

PELAYANAN PELATIHAN PETUGAS PEMERIKSA KESEHATAN JEMAAH HAJI DI UPT. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Aladin¹
Isjoni²
Azhar²

¹Post Graduate Student of Riau University

²Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

Abstract: *The profile of Indonesian hajj in the last ten years belongs to high risk groups that could endanger safety and health of hajj in their performing at Tanah Suci. The Government of Indonesia through the Ministry of Health has taken a strategic step in improving health of Indonesian hajj by conducting training of Hajj Health Check Officer (HHCO). This research includes of qualitative research with interview data collection techniques and documentation. Service of training hajj health check officer consists of three aspects, namely planning, implementation, and evaluation. Planning is arranged systematically so that the organizing committee can work in accordance with duties and functions. Implementation of training is carried out in accordance with planned curriculum and training schedule. The service of training implementation can be seen from pre-process of learning, learning process, and closing of training. Furthermore, evaluation of training consists of three components, namely evaluation of participants, evaluation of facilitator and evaluation of organization. Evaluation results show that participants understand the training materials provided. Evaluation results of facilitator indicate that facilitator can convey their knowledge and skills well to participants. And evaluation results of organization shows that participants are satisfied with training organizer. Based on the evaluation of participants, facilitators, and organizers, it can be concluded that training service of HHCO at UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengembangan Sumber Daya Manusia and Kesehatan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau are considered good. Training of HHCO have provided knowledge and insight in accordance with the field of work.*

Key words: *Service, Training of Hajj Health Check Officer*

Abstrak: Profil jamaah haji Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tergolong dalam kelompok resiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan jamaah haji dalam menjalankan ibadahnya di Tanah Suci. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengambil langkah strategis dalam upaya peningkatan pembinaan kesehatan jamaah haji Indonesia dengan menyelenggarakan pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji (PPKJH). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pelayanan pelatihan petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji dilihat dari tiga aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan disusun secara sistematis sehingga panitia penyelenggara dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan jadwal pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelayanan terhadap pelaksanaan pelatihan dapat dilihat dari pra proses pembelajaran, proses pembelajaran, dan penutupan pelatihan. Selanjutnya evaluasi pelatihan terdiri dari tiga komponen, yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap fasilitator dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Hasil evaluasi terhadap peserta menunjukkan bahwa peserta memahami materi pelatihan yang diberikan. Hasil evaluasi terhadap fasilitator menunjukkan bahwa fasilitator dapat menyampaikan pengetahuan dan keterampilan dengan baik kepada peserta. Dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan menunjukkan bahwa peserta merasa puas dengan penyelenggara pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta, fasilitator, dan penyelenggara, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau dinilai baik. Pelatihan PPKJH telah memberikan pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang pekerjaan.

Kata Kunci: Pelayanan, Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji

PENDAHULUAN

UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai suatu organisasi yang merupakan bagian dari pelaksana pelatihan di wilayah Provinsi Riau dituntut untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam menunjang pelaksanaan pelatihan dibidang kesehatan. UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan mampu menjadi daya ungkit yang kuat dalam rangka penyelenggara pelatihan dibidang kesehatan yang kompeten dan professional menuju birokrasi yang berkualitas. Salah satunya dengan penyelenggaraan pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji.

Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji (PPKJH) merupakan bagian dari pelatihan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mencapai upaya standarisasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jamaah haji di kabupaten/kota. PPKJH adalah dokter dan perawat yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Pusdiklat Aparatur dan Pusat Kesehatan Haji, 2014).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji Indonesia, peran PPKJH adalah memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji di puskesmas dan rumah sakit menjadi sangat penting dan strategis. Untuk mempersiapkan petugas yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji, maka diperlukan pelatihan PPKJH yang sesuai dengan standar dan mutu. Pelayanan pelatihan bidang kesehatan yang terstandar dan bermutu harus memiliki syarat dan kualifikasi sesuai dengan Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.

Profil jamaah haji Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebanyak 55% s/d 56% jamaah haji Indonesia adalah ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan masih tergolong rendah sampai menengah. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes), hampir setiap tahun sekitar 60% s.d 67% dari total jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, tergolong dalam kelompok Resiko Tinggi (Risti) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan jamaah haji dalam menjalankan ibadahnya di Tanah Suci. Angka kesakitan dan kematian cenderung berfluktuatif, namun masih dapat dinyatakan tinggi (Data dari Permenkes Nomor 15 Tahun 2016).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Dewantari, SKM, sebagai pengelola program kesehatan haji dinas kesehatan Provinsi Riau pada Rabu, 25 Oktober 2017. Ibu Sri Mulyani Dewantari, SKM, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon jamaah haji pada saat hendak mendaftar sebagai jamaah haji untuk memperoleh nomor porsi. Bagi jamaah haji yang telah memperoleh nomor porsi tetapi belum dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama, maka jamaah haji tersebut harus melakukan pemeriksaan tahap pertama dikarenakan pemeriksaan tersebut sangat penting dan mendasar.

Ibu Sri Mulyani Dewantari, SKM, menambahkan pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, penetapan tingkat resiko kesehatan, dan rekomendasi atau saran atau rencana tindak lanjut. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan jamaah haji. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan keharusan setiap jamaah haji agar dilakukan secara dini atau sesegera mungkin setelah mendapatkan nomor porsi atau paling lambat dua tahun dari perkiraan keberangkatan.

Selain itu, kenyataan yang terjadi di lapangan, dokter maupun perawat yang bertugas sebagai pemeriksa kesehatan calon jamaah haji belum maksimal, masih ada kendala-kendala yang perlu

diperbaiki. Berdasarkan Evaluasi Pasca Pelatihan yang telah dilakukan oleh UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau, petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji belum ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Masih banyak dokter atau perawat yang belum ditugaskan dari atasan setempat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kesehatan calon jamaah haji.

Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 menjelaskan perlunya melibatkan berbagai lintas program kesehatan yang terintegrasi dalam proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan kepada jamaah haji di kabupaten/kota, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, profesional, dan akademisi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengambil langkah strategis dalam upaya peningkatan pembinaan kesehatan jamaah haji Indonesia dengan menyelenggarakan pelatihan petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji yang sebelumnya hanya satu angkatan ditingkatkan menjadi tiga angkatan. Oleh karena itu, pelatihan PPKJH diharapkan dapat memberikan informasi kepada petugas pemeriksa kesehatan calon jamaah haji, sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada calon jamaah haji.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus dari penelitian ini adalah pelayanan pelatihan PPKJH di UPT.PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan PPKJH di UPT.PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan hasil eksplorasi atas subjek penelitian secara rinci, lengkap, dan mendalam (Nusa Putra, 2012). Pelatihan PPKJH dilaksanakan di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2017. Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data-data yang terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dengan demikian data ini bersifat skematik, narasi, dan uraian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau, widyaiswara, panitia, dan peserta yang mengikuti pelatihan PPKJH.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan telaah dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan peneliti untuk melakukan tanya jawab secara lisan melalui tatap muka dengan narasumber. Pedoman wawancara berisi sejumlah pertanyaan pokok yang disusun oleh peneliti terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Telaah dokumentasi digunakan sebagai panduan peneliti untuk menelaah dokumen-dokumen yang terkait pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Telaah dokumentasi pada tahap perencanaan meliputi kurikulum, modul, surat-surat, dan jadwal pelatihan. Telaah dokumentasi pada tahap pelaksanaan meliputi daftar hadir, data peserta, data fasilitator, dan sarana prasarana pelatihan. Telaah dokumentasi pada tahap evaluasi meliputi laporan pelatihan, form evaluasi, sertifikat pelatihan, dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji (PPKJH) merupakan bagian dari pelatihan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mencapai upaya standarisasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jamaah haji di kabupaten/kota (Pusdiklat Aparatur dan Pusat Kesehatan Haji, 2014). Pelatihan ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, dan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016. Berikut penjabaran pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Perencanaan Pelatihan PPKJH

Persiapan pelatihan diawali dengan pengajuan berkas akreditasi kepada tim akreditasi pelatihan, satu bulan sebelum penyelenggaraan pelatihan, komponen komponen yang diakreditasi adalah

komponen kurikulum, komponen pelatih, komponen peserta, komponen penyelenggara pelatihan, dan komponen tempat pelatihanserta melampirkan formulir pengajuan akreditasi pelatihan yang sudah terisi lengkap, jadwal pelatihan, lembar penugasan, soal ujian *pretest* atau *posttest*, form evaluasi terhadap narasumber, form evaluasi penyelenggaraan, surat tugas Master of Training (MOT), SK panitia penyelenggara dan kerangka acuan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Staf seksi diklat sebagai panitia penyelenggara melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi pekerjaan yang diberikan dari Kepala UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Perencanaan ini disusun secara sistematis sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau, panitia penyelenggara telah mempersiapkan atau merencanakan pelatihan sebaik mungkin sehingga pelatihan dapat berjalan dengan baik. Staf seksi diklat sebagai panitia penyelenggara melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing sehingga pelatihan PPKJH dapat direncanakan dengan baik.

Pelaksanaan Pelatihan PPKJH

Pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau dilaksanakan sebanyak tiga angkatan. Pelatihan PPKJH Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d 03 Maret 2017 yang diikuti oleh 30 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Pelatihan PPKJH Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 Maret 2017 yang diikuti oleh 13 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dan 17 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Dan pelatihan PPKJH Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 21 April 2017 yang diikuti oleh 10 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dan 13 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003, peserta yang mengikuti pelatihan adalah tim pemeriksa kesehatan jamaah haji di puskesmas dan rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Dokter Umum atau Spesialis, bekerja di Puskesmas atau Rumah Sakit dan masih melakukan praktik fungsional.
- b) Perawat, berpendidikan minimal D III Keperawatan, bekerja di Puskesmas atau Rumah Sakit dan masih melakukan praktik fungsional.

Narasumber atau fasilitator pada pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengacu Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003 yaitu telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT), memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang diberikan sesuai GBPP yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan, telah mengikuti TOT pelatihan PPKJH, pernah menjadi tim pemeriksa kesehatan jamaah haji di puskesmas atau rumah sakit.

Struktur Program pada pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengacu pada Badan PPSDMK Pusdiklat Aparatur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Materi pelatihan disusun dengan struktur program sebagai berikut.

Tabel 1. Materi Pelatihan PPKJH

NO	MATERI PELATIHAN	WAKTU			JML
		T	P	PL	
A.	MATERI DASAR				
	1. Kebijakan pemeriksaan kesehatan haji	2	0	0	2
B.	MATERI INTI				
	1. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji	2	2	2	6
	2. Perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji	2	2	2	6
	3. Pencatatan dan pelaporan pemeriksaan kesehatan jamaah haji di Puskesmas dan Rumah Sakit	3	3	2	8
	4. Perlindungan dan pengendalian factor risikokesehatan individu jamaah haji	1	2	0	3
	5. Pembinaan kesehatan jamaah	3	5	2	10
C.	MATERI PENUNJANG				

1. Membangun Komitmen Belajar (BLC)	0	3	0	3
2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	1	1	0	2
3. Anti korupsi	2	0	0	2
JUMLAH	16	18	8	42

Selanjutnya pelaksanaan pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan jadwal pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelayanan terhadap pelaksanaan pelatihan dapat dilihat dari pra proses pembelajaran, proses pembelajaran, dan penutupan pelatihan. Pada proses pembelajaran peserta mendapatkan materi-materi pelatihan yang terkait dengan PPKJH. Materi ini disampaikan oleh narasumber atau fasilitator yang dipilih sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selama pelaksanaan pelatihan, peserta mendapatkan sarana prasarana seperti fasilitas ruang belajar, alat bantu pelatihan, bahan belajar, penyediaan dan kebersihan kamar kecil, pelayanan sekretariat, penyediaan pelayanan akomodasi, dan penyediaan pelayanan konsumsi.

Evaluasi Pelatihan PPKJH

Evaluasi terhadap pelatihan di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengacu Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003 terdiri dari 3 komponen, yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap narasumber atau fasilitator dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui uji kemampuan melalui *pretest* dan *posttest* terhadap peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan peserta tentang materi yang telah diberikan selama pelatihan dan untuk mengetahui daya serap peserta terhadap materi yang diberikan selama pelatihan. Berikut data nilai *pretest* dan *posttest* yang diperoleh dari data Laporan Pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai *Pretest* dan *Posttest*

	Angkatan I		Angkatan II		Angkatan III	
	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
Nilai Terendah	33	43	30	50	33	57
Nilai Tertinggi	60	83	70	80	77	80
Nilai Rata - Rata	48,6	66	50,1	70,7	48,0	69

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Dewantari, SKM, sebagai pengelola program kesehatan haji dinas kesehatan Provinsi Riau dan fasilitator pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Juni 2017 di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Ibu Sri Mulyani Dewantari, SKM menjelaskan bahwa untuk mengetahui perkembangan kognitif peserta pelatihan maka dapat dilihat dari nilai *pretest* dan *posttest*. *Pretest* dilaksanakan sebelum peserta mengikuti proses pembelajaran, sedangkan *posttest* dilaksanakan setelah peserta mengikuti semua materi pelatihan. Peningkatan nilai *pretest* dan *posttest* menunjukkan bahwa peserta memahami materi pelatihan yang diberikan oleh narasumber. Ibu Sri Mulyani Dewantari, SKM menambahkan bahwa semua peserta dinyatakan lulus karena telah memenuhi persyaratan indikator keberhasilan pelatihan, yang diukur dari hasil nilai ujian *posttest* peserta dengan hasil nilai rata – rata baik.

Evaluasi terhadap fasilitator dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian narasumber atau fasilitator yang diedarkan setiap berakhirnya materi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh narasumber atau fasilitator mampu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan dengan baik kepada peserta, seberapa jauh materi yang diberikan dapat dipahami dan diserap oleh peserta pelatihan, serta untuk mengukur keberhasilan pelatihan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berikut rekapitulasi evaluasi terhadap narasumber atau fasilitator pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Fasilitator

Aspek yang dinilai	Angkatan I	Angkatan II	Angkatan III
Penguasaan materi	Sangat Baik	Baik	Baik
Ketepatan waktu	Sangat Baik	Baik	Baik
Sistematika penyajian	Sangat Baik	Baik	Baik
Penggunaan metode dan alat bantu diklat	Sangat Baik	Baik	Baik
Empati, gaya dan sikap terhadap peserta	Sangat Baik	Baik	Baik
Penggunaan bahasa dan volume suara	Sangat Baik	Baik	Baik
Pemberian motivasi belajar kepada peserta	Sangat Baik	Baik	Baik
Pencapaian tpu	Sangat Baik	Baik	Baik
Kesempatan tanya jawab	Sangat Baik	Baik	Baik
Kemampuan menyajikan	Sangat Baik	Baik	Baik
Kerapian pakaian	Sangat Baik	Baik	Baik
Kerjasama antar tim pengajar	Sangat Baik	Baik	Baik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan panitia penyelenggara, Ibu Feron Siska, SKM, pada hari Kamis, 8 Juni 2017 di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau, lembar penilaian narasumber atau fasilitator diberikan kepada setiap peserta setelah mendapatkan materi yang diberikan. Lembar penilaian fasilitator dibuat untuk setiap fasilitator yang memberikan materi kepada peserta. Selanjutnya panitia penyelenggara merekapitulasi hasil penilaian fasilitator untuk satu angkatan, dengan kriteria sebagai berikut.

- Nilai 45 – 55 : Kurang
- Nilai 56 – 75 : Sedang
- Nilai 76 – 85 : Baik
- Nilai besar dari 85 : Sangat Baik

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yaitu evaluasi yang dilakukan oleh peserta untuk menilai penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan diakhir proses pelatihan dengan menggunakan lembar evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Berikut hasil rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Tabel 4 . Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai	Angkatan I	Angkatan II	Angkatan III	Angkatan
Pengalaman belajar dalam pelatihan ini	Baik	Baik	Baik	Baik
Rata – rata penggunaan metode pembelajaran oleh pengajar	Baik	Baik	Baik	Baik
Tingkat semangat belajar (motivasi) saudara untuk mengikuti program latihan	Baik	Baik	Baik	Baik

Tingkat kepuasan saudara terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar	Baik	Baik	Baik
Kenyamanan ruang belajar	Baik	Baik	Baik
Penyediaan alat bantu pelatihan didalam kelas	Baik	Baik	Baik
Peyediaan dan pelayanan bahan belajar (seperti penggandaan, bahan diskusi)	Baik	Baik	Baik
Penyediaan dan kebersihan kamar kecil	Baik	Cukup	Cukup
Pelayanan sekretariat	Baik	Baik	Baik
Penyediaan pelayanan akomodasi	Baik	Baik	Baik
Penyediaan dan pelayanan konsumsi	Baik	Baik	Baik

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara bersama Ibu Intan Niah, SKM yang bertugas merekapitulasi penyelenggaraan pelatihan pada Kamis, 8 Juni 2017 di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Lembar evaluasi penyelenggaraan diberikan kepada setiap peserta di hari terakhir pelatihan. Lembar evaluasi dibuat untuk menilai penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan terkait pengalaman peserta selama mengikuti pelatihan sampai kepada sarana prasarana yang diberikan selama pelatihan.

Peneliti kemudian mewawancarai peserta pelatihan Ibu Wahida, AMK yang berasal dari RSUD Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Jum'at, 16 Juni 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil wawancara, peserta menjelaskan bahwa pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau memberikan pengetahuan dan wawasan baru sesuai dengan bidang pekerjaan. Ibu Wahida, AMK merasakan peningkatan kinerja setelah mengikuti pelatihan PPKJH.

Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti bersama Ibu dr. Samina Rayanti Matondang yang berasal dari Puskesmas Pujud Kabupaten Rohil, Rabu, 5 Juli 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Ibu dr. Samina Rayanti Matondang menjelaskan bahwa setelah mengikuti pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau, beliau dapat menerapkan ilmu yang diperoleh sesuai dengan tugas dan tupoksi pekerjaan di lingkungan kerja. Pelayanan pelatihan yang baik selama pelatihan memberikan pengalaman yang baik bagi peserta pelatihan.

SIMPULAN

Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji merupakan bagian dari pelatihan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mencapai upaya standarisasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jamaah haji di kabupaten/kota. Pelayanan terhadap pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Perencanaan pelatihan PPKJH disusun secara sistematis sehingga panitia penyelenggara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing. Pelatihan PPKJH telah direncanakan sebaik mungkin sehingga pelatihan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan jadwal pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelayanan terhadap pelaksanaan pelatihan dapat dilihat dari pra proses pembelajaran, proses pembelajaran, dan penutupan pelatihan.

Evaluasi pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau terdiri dari 3 komponen, yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap narasumber atau fasilitator dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta, fasilitator, dan penyelenggara, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelatihan PPKJH di UPT. PKK PSDM dan

KOM Dinas Kesehatan Provinsi Riau dinilai baik. Pelayanan pelatihan yang baik memberikan pengalaman yang baik pula bagi peserta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmenkes Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.
- Nusa Putra. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji untuk Menuju Keluarga Sehat.
- Pusdiklat Aparatur dan Pusat Kesehatan Haji. 2014. Kurikulum dan Modul Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji (PPKJH). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.